

## **BAB II**

### **AMERIKA SERIKAT DAN KETERLIBATANNYA DALAM SEKTOR KEAMANAN ASIA PASIFIK**

Hubungan antara AS dan kawasan Asia Pasifik sejatinya memiliki sejarah hubungan yang cukup panjang. Hubungan antara AS dengan negara-negara di kawasan ini bahkan telah terjalin sejak sebelum dunia disibukkan dengan berbagai perang dan konflik yang ada. Tentu, hubungan kedua pihak telah banyak mengalami dinamika yang baik dan tidak baik. Belum lagi ditambah dengan dinamika hubungan bilateral yang telah dijalin oleh AS dengan negara-negara tertentu di kawasan ini.

Bab ini nantinya akan menjelaskan bagaimana kondisi dan dinamika kebijakan luar negeri AS di sektor keamanan. Kemudian penulis akan menjelaskan terkait penempatan pangkalan militer serta pendistribusian militer AS di kawasan Asia Pasifik di era Presiden Obama dan penulis juga tertarik melihat bagaimana respon berbagai pihak atas kebijakan AS ini.

#### **A. Kondisi Kebijakan Keamanan AS**

Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang mempunyai kekuatan ekonomi dan militer terdepan di dunia dengan kepentingan global dan jangkauan global yang tidak tertandingi. Dalam ekonomi global, Amerika Serikat menjadi pendorong utama dan pemimpin dunia dalam investasi dan perdagangan internasional, inovasi dan teknologi baru, kapitalisasi pasar saham dan pangsa perusahaan global yang besar.

Sebagai negara adikuasa, AS juga mempunyai peran besar dalam panggung global dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Hal yang dilakukan adalah dengan aktif dalam politik luar negeri. Politik luar negeri AS meliputi

berbagai kebijakan yang berupa kebijakan diplomatik, kebijakan ekonomi dan kebijakan keamanan/militer.

Merupakan rahasia umum bahwa politik luar negeri memang bersifat tidak tetap, karena sewaktu-waktu bisa saja berubah tergantung dengan kepentingan nasional yang ingin dipenuhi. Hal ini tak lain karena apabila berbicara terkait politik luar negeri, tentu membicarakan tentang strategi dan cita-cita, serta mengatur terkait metode, tindakan, arahan, pemahaman, hingga kesepakatan, untuk kemudian mengatur urusan eksternal, terutama dalam berhubungan dengan negara asing. Pengelolaan hubungan luar negeri menghendaki agar mempertimbangkan dengan hati-hati rencana tindakan yang diambil untuk kepentingan dan urusan luar negeri yaitu cita-cita pemerintah (Jackson & Sorensen, 2013).

Perubahan kepentingan nasional AS juga bisa dilihat dari pergantian fokus akan kehadirannya terhadap suatu wilayah. Tentu AS memiliki berbagai kepentingan di berbagai wilayah namun terkadang dalam upaya menanggapi suatu isu, AS memfokuskan kehadirannya di suatu regional. Pada awal tahun 2000-an, dalam upaya menanggapi isu terorisme yang terjadi paska tragedi 9/11, AS fokus terhadap isu ini dan mulai memfokuskan kehadirannya di Timur Tengah, sebelum kemudian fokus ini dirubah oleh presiden Barack Obama yang lebih memfokuskan kawasan Asia Pasifik sebagai tujuan utama.

### **1. Doktrin Bush dan Fokusnya di Kawasan Timur Tengah**

Setelah tragedi 9/11, kebijakan luar negeri AS berubah sangat mencolok dalam berbagai cara. Perubahan nyata adalah fokusnya pada tindakan pencegahan yang dikenal sebagai Doktrin Bush. Doktrin Bush ini adalah strategi pencegahan teroris atau rezim berbahaya yang mengembangkan,

memperoleh ataupun menggunakan senjata pemusnah massal. Strategi ini juga mendorong perluasan demokrasi di negara-negara Muslim di Timur Tengah maupun di tempat lain di dunia (CRF, 2012).

Doktrin ini diresmikan pada bulan September 2002 yang berfokus pada tiga hal. Yang pertama adalah perang preventif (Gary & Greg, 2014). Perang preventif merupakan indikasi strategi yang berusaha untuk mempertahankan dengan menyerang mereka yang menjadi ancaman langsung dan membiarkan kebijakan untuk membenarkan pencarian militer sepihak untuk kepentingan Amerika secara khusus. Yang kedua adalah tindakan sepihak oleh AS jika perlu membela diri baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah penyebaran demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia yang berfokus pada konsep kebebasan individu, perdagangan bebas, dan pasar bebas.

Setelah tragedi 9/11 ini, "*War on Terrorism*" menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri AS. AS mulai menyerang beberapa kelompok Islam yang sebagian besar berada di Timur Tengah, seperti kelompok Al-Shabaab di Somalia, Taliban di Afghanistan, Al-Qaeda di Afghanistan dan Irak, dan negara Islam Irak dan Suriah, untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasional di seluruh dunia. AS memiliki keyakinan bahwa kelompok-kelompok Islam ini melakukan interpretasi radikal terhadap Islam dan sangat menentang Barat. AS juga yakin bahwa kelompok-kelompok ini merupakan ancaman besar bagi AS, kepentingan keamanan sekutunya, dan stabilitas seluruh kawasan (Atallah, 2017).

Keterlibatan Al-Qaeda dalam serangan 9/11 membuat kelompok ini menjadi salah satu sasaran

penyerangan. Setelah serangan 11 September tersebut tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2001, AS meluncurkan operasi “*Enduring Freedom*” di Afghanistan yang merupakan tempat dimana Taliban berada, setelah Taliban menolak untuk menyerahkan pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden. AS menggulingkan Taliban dalam waktu hitungan minggu dan pada bulan November 2001, sekitar 1.000 tentara AS dikerahkan ke Afghanistan dan meningkat menjadi 10.000 pada tahun setelahnya (Al Jazeera, 2017).

Tidak hanya Afghanistan, Iraq yang dianggap menjadi sarang Al-Qaeda membuat perhatian besar tercurahkan pada kawasan Timur Tengah yang mana kelompok-kelompok Islam ekstrimis berasal dari negara-negara di kawasan tersebut. Setelah invansi Afghanistan, Presiden Bush menuduh Irak mendukung terorisme. Bush mengklaim bahwa ada hubungan antara Irak, Saddam Hussein, dan Al-Qaeda, serta pertemuan personel intelijen Irak dengan Osama bin Laden di Sudan (Milbank, 2004).

Pada 19 Maret 2003, AS menginvasi Irak dan meruntuhkan rezim Saddam Hussein. Invansi tersebut pada dasarnya dikatakan untuk mencegah Iraq memasok senjata ke teroris karena Saddam Hussein dan Al-Qaeda dikatakan memiliki keterkaitan dan pemerintah AS mengatakan bahwa rezim Saddam Hussein mempunyai bahan nuklir yang dapat segera memproduksi senjata atom. Bush menuduh rezim Irak melanggar hak asasi manusia, memiliki senjata pemusnah massal, dan menyembunyikan para pemimpin teroris. Oleh karena itu, rezim Irak dianggap mengancam keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah.

## **2. Obama dan Offshore Balancingnya di Asia Pasifik**

Pada masa pemerintahan Bush, terlihat bahwa AS lebih condong kepada Timur Tengah dan dengan serius memberantas teroris-teroris yang ada disana. Ketika Obama terpilih menjadi Presiden, Obama mewarisi dua perang di Timur Tengah, yaitu perang di Iraq dan di Afghanistan. Ketika kampanye pemilihan pada 2008, Obama berjanji untuk menarik pasukan AS sesegera mungkin dan hal ini terlaksana sesuai janji. Februari 2009, Obama mengumumkan rencana untuk menurunkan tingkat pasukan dari 160.000 menjadi 50.000 pada bulan Agustus 2010 yang termasuk dengan pemindahan semua pasukan tempur, disusul pasukan yang tersisa akan ditarik pada akhir tahun 2011. Lalu pada 2012 menurun menjadi hanya 150 tentara yang berada di Iraq (Nelson, 2013).

Obama sendiri terlihat lebih tertarik pada kawasan Asia Pasifik dengan melihat peningkatan kekuatan negara-negara yang berada di kawasan ini. Peningkatan kekuatan Cina telah menjadi perhatian masyarakat global. Meningkatnya Cina dalam bidang ekonomi maupun keamanan membuat Cina menjadi mitra dagang utama hampir di semua negara di kawasan Asia Pasifik.

Namun tidak hanya China, negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik juga telah mengalami kemajuan seperti Jepang, Korea Selatan dan India. Pertumbuhan yang sangat penting bagi AS dalam menerapkan kepentingannya di kawasan ini. Secara politik dan strategis untuk menekan kebangkitan China dan memblokir pengaruh China di kawasan Asia Pasifik serta memastikan AS masih tetap menjadi yang dominan, serta secara ekonomi ingin berbagi

keuntungan ekonomi dengan cepatnya pembangunan ekonomi di Asia Pasifik dalam rangka menciptakan beberapa peluang kegiatan untuk AS paska Krisis Finansial Global 2008 (Amadeo, 2018).

*“The U.S. military will continue contributing to security on a global scale, but we need to shift the focus of our military presence to Asia-Pacific region” – Barack Obama.* (Department of Defense States of America, 2014)

AS yang dulunya mempunyai pangkalan militer yang besar dan berpusat di satu negara, kini mengubah strateginya menjadi pangkalan militer kecil namun tersebar di seluruh belahan dunia, sehingga cakupan negara yang dimiliki dapat lebih luas, dalam rangka untuk memastikan tujuan strategis tercapai.

Fokus militer di wilayah Timur Tengah yang ditutupi oleh wilayah daratan, tentu berbeda kondisi dengan wilayah Asia Pasifik yang mayoritas negaranya merupakan negara kepulauan. Untuk itulah kemudian muncul sebuah istilah yang dinamakan *Offshore Balancing* atau penyeimbangan garis pantai.

*Offshore Balancing* sendiri merupakan strategi atau kebijakan lepas pantai yang dilancarkan AS untuk mengontrol langsung proses internal negara lain, dengan cara melakukan pembangunan dan peningkatan kemampuan militer. Strategi ini bisa dibilang memungkinkan kekuatan besar untuk mempertahankan kekuatannya tanpa biaya penyebaran militer besar di seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh AS dan Uni Soviet di era Perang Dingin (Mearsheimer & Walt, 2014).

Menurut ilmuwan politik John Mearsheimer, di kelasnya "*American Grand Strategy*" Universitas Chicago, *Offshore Balancing* adalah strategi yang digunakan oleh AS pada 1930-an dan juga dalam Perang Iran-Irak 1980-1988.

*Offshore Balancing* juga bertujuan untuk mencurahkan usaha yang lebih banyak dalam mengamankan kepentingan dan kepemimpinan AS dengan mempengaruhi perkembangan di Asia Pasifik yakni dengan cara pembentukan dan peningkatan sejumlah basis militer AS di Asia Pasifik (Mills, 2015). Bukti ini diperkuat dengan kunjungan Obama ke Australia di mana dia mengumumkan penggelaran sekitar 2.500 militer ke utara Australia yang berfungsi sebagai kekuatan yang stabil dan akan mengimbangi kemunculan China yang tumbuh di wilayah tersebut (Amies, 2011)

## **B. Penempatan Pangkalan Militer dan Distribusi Militer AS di Asia Pasifik**

Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang mempunyai kekuatan ekonomi dan militer terdepan di dunia dengan kepentingan global dan jangkauan global yang tidak tertandingi. Produk domestik bruto AS menyumbang hampir seperempat dari total dunia dan anggaran militernya diperhitungkan hampir sama banyak dengan pengeluaran pertahanan dunia yang disatukan.

Perkiraan belanja militernya diperkirakan sebesar US\$ 886 miliar. Belanja militer menjadi pengeluaran kedua terbesar AS setelah jaminan sosial. Terdapat empat komponen yang menjadi alasan besarnya pengeluaran anggaran militer AS. Pertama adalah anggaran dasar sebesar US\$ 597,1 miliar ke Departemen Pertahanan. Kedua adalah anggaran sebesar US\$ 88,9 miliar ke

Departemen Pertahanan untuk operasi kontijensi di luar negeri untuk melawan kelompok Islam. Ketiga adalah jumlah instansi lain yang melindungi negara sebesar US\$ 181,3 miliar. Instansi-instansi tersebut yaitu Departemen Urusan veteran (US\$ 83,1 miliar), Homeland Security (US\$ 46 miliar), FBI dan *Cybersecurity* di Departemen Kehakiman (US\$ 8,8 miliar) dan Administrasi Keamanan Nuklir Nasional di Departemen Energi (US\$ 15,1 miliar). Lalu yang keempat adalah dana untuk Departemen Luar Negeri dan Keamanan Dalam Negeri untuk melawan ISIS sebesar US\$ 18,7 miliar (Kimberly, 2018).

Tujuan militer AS adalah untuk membelanya dari serangan. Selain itu adalah untuk melindungi warga AS diluar negeri, sekutu dan kebebasan menggunakan udara, laut, dan ruang internasional. AS juga bertujuan untuk membela diri dan kepentingannya dan mencegah musuh atau oportunist mengambil tindakan yang akan menghambat kepentingan AS, serta kemampuan untuk mencegah destabilisasi suatu wilayah dan menjaga perdamaian maupun keamanan sekutu AS. Inilah kemudian beberapa alasan AS menempatkan berbagai pangkalan militer baru dan atau kembali mengaktifkan pangkalan militer yang sudah lama tidak digunakan akibat berbagai alasan. Pangkalan militer itu antara lain:

### **1. Pangkalan Permanen Yokosuka (Jepang) & Lombrum Naval Base (PNG)**

Pangkalan Permanen Angkatan Laut Yokosuka milik AS ini terletak di Prefektur Kanagawa, Kota Yokosuka. Sebagai sebuah pangkalan permanen, pangkalan yang diberi nama *Commander Fleet Activities Yokosuka* (CFAY) ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, termasuk fasilitas pendukung, personil, gudang senjata dan amunisi. Selain

itu, pangkalan ini memiliki tugas untuk melakukan berbagai pemeliharaan, berbagai pengiriman logistik, serta berbagai bantuan administrasi bagi personil militer AS di seluruh wilayah aliansi AS, di wilayah Pasifik Barat. atau yang dikenal dengan Commander, Logistic Group, Western Pacific (COMLOG WESTPAC) (Commander U.S 7th Fleet, 2010). Jumlah personil militer AS di pangkalan ini sendiri berkisar antara 6.000-7.000 personil. (Muto, 2004)

Dari total 50-70 kapal laut milik AS yang tersebar di wilayah COMLOG WESTPAC, 23 diantaranya berada di Jepang, dan berbagai operasi pemeliharaan kapal-kapal ini dimandatkan kepada pangkalan Yokosuka. Beberapa kapal yang sering melakukan pemeliharaan di pangkalan ini adalah kapal induk tenaga nuklir USS George Wahington, USS Ronald Reagan, Kapal komando USS Blue Ridge, dan kapal perusak USS Fitzgerald (CNIC, 2009).

Kemudian, pangkalan ini juga memiliki misi untuk memelihara dan mengoperasikan fasilitas pangkalan untuk dukungan logistik, rekreasi, administrasi, dan layanan Angkatan Laut AS di Jepang. Namun, pangkalan ini kemudian mulai tidak aktif, semenjak peristiwa gempa bumi disusul tsunami di Jepang, serta peristiwa kecelakaan nuklir di Fukushima 2011. Akibat krisis ini, lebih dari 3.000 militer AS meninggalkan pangkalan dan bahkan ada yang meninggalkan Jepang (Reed, 2011). Namun, pangkalan ini kemudian diaktifkan kembali pada Agustus

2013, ditandai dengan penunjukan David Glenister sebagai kapten baru pangkalan ini.

Sementara itu, Pangkalan Angkatan Laut Lombrum atau HMPNGS Tarangau adalah pangkalan militer angkatan laut yang dioperasikan oleh Elemen Operasi Maritim Angkatan Pertahanan Papua Nugini (PNGDF). Terletak di Pulau Manus di Papua Nugini. Lombrum adalah rumah pelabuhan bagi pasukan patroli kelas Pasifik PNGDF (Dennis, Grey, Morris, & Prior, 2008).

Lombrum merupakan pangkalan Angkatan Laut AS, yang didirikan pada Januari 1944 setelah mendapatkan pulau itu dari Jepang. AS kemudian mulai meninggalkan pangkalan ini pada tahun 1946 akibat kebijakan mereka yang mengalihkan fokus strategis menjauh dari kawasan Pasifik.

Pemerintah Australia kemudian mengambil alih pangkalan ini, melakukan sejumlah renovasi, dan kemudian kembali dibuka dengan nama pangkalan *Royal Australian Navy* (RAN) HMAS Seeadler pada 1 Januari 1950, untuk menggantikan pangkalan RAN di Pelabuhan Dreger,

Finschhafen (The Sydney Morning Herald, 1949).

Gambar 2.1: Gambar Australia - Papua Nugini



Sumber: Research Gate [https://www.researchgate.net/figure/Detailed-maps-of-Manus-Island-and-large-surrounding-areas-with-elevation-and-indication\\_fig1\\_252317674](https://www.researchgate.net/figure/Detailed-maps-of-Manus-Island-and-large-surrounding-areas-with-elevation-and-indication_fig1_252317674)

Pangkalan ini banyak digunakan sebagai pangkalan pengisian bahan bakar dan toko untuk kapal RAN ketika melakukan perjalanan ke wilayah Australia atau Asia Tenggara. Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pangkalan ini diberikan oleh Australia kepada Papua Nugini sebagai bagian dari proses kemerdekaan mereka dari Australia. Akhirnya, semenjak 14 November 1974, Papua Nugini mengambil alih pangkalan ini dan diberi nama Pangkalan Angkatan Pertahanan Lombrum.

Pada tahun 2016, terdapat perjanjian bersama antara AS, Australia dan Papua Nugini, untuk kembali mengaktifkan dan melakukan *upgrading* terhadap fasilitas militer

yang ada di Lombrum. AS memiliki alasan untuk terus menekan kehadiran China di kawasan Asia Pasifik. Kebijakan ini hadir, akibat munculnya kabar bahwa China membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau Vanuatu. Akibat hal ini, Australia dan AS pun khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di Pasifik (CNN Indonesia, 2016).

## **2. Pangkalan Garis Depan AL Changi (Singapura) & Kadena Selatan (Jepang)**

Amerika Serikat dan Singapura menandatangani *US-Singapore Defense Cooperation Agreement*, pada 2015 silam. Dalam pakta pertahanan ini, kedua negara menyediakan kerangka kerja baru untuk hubungan pertahanan yang semakin diperluas.

Singapura dan Amerika Serikat pada dasarnya telah memiliki hubungan pertahanan yang lama dan kuat. Singapura mulai menjadi mitra strategis AS, semenjak mereka mendukung kehadiran militer AS saat terjadi penutupan pangkalan AS di Filipina pada tahun 1991, kemudian mendukung upaya AS di Afghanistan dan Irak, dan merupakan negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan Koalisi Global pimpinan AS untuk Counter ISIL (Prashanth, 2015).

Singapura juga telah memberikan berbagai dukungan logistik untuk sejumlah pesawat dan kapal militer AS di kawasan, atas kesepakatan *Memorandum of Understanding*

(MOU) 1990 dan Strategic Framework Agreement (SFA) tahun 2005 (MINDEF SINGAPORE, 2015).

Namun, kedua pihak sepakat untuk semakin meningkatkan hubungan ketika kedua negara memperingati 50 tahun hubungan bilateral pada 2016 silam. Menteri Pertahanan AS, Ash Carter dan Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen bertemu di Pentagon dan menandatangani *Defense Cooperation Agreement* (DCA).

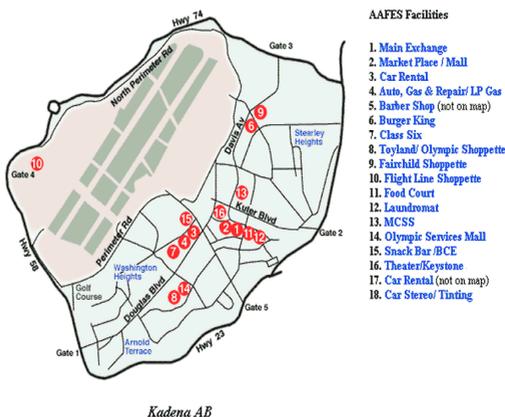
Menurut pernyataan bersama, di bawah DCA yang disempurnakan, kedua belah pihak menyepakati kerangka kerja luas untuk kerja sama pertahanan yang meliputi lima bidang: militer, kebijakan, strategi dan teknologi, bersama dengan kerja sama melawan tantangan keamanan non-tradisional seperti terorisme dan pembajakan. Mereka juga sepakat untuk meningkatkan kolaborasi di bidang-bidang baru termasuk bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana (HADR), *cybersecurity*, *biosecurity* dan komunikasi publik.

Dalam perjanjian ini juga disepakati oleh Ng dan Carter, terkait kerjasama pertahanan khusus lainnya. Antara lain: Melakukan *upgrading* terhadap kualitas Pangkalan Tempur Garis Depan AS di Changi, Singapura. Serta akan dilakukan Penyebaran pertama dari pesawat mata-mata P-8 Poseidon A.S. ke Singapura dari 7 Desember hingga 14 Desember 2015. Penempatan ini penting karena memberikan Amerika Serikat lokasi

lain untuk melakukan pengawasan kawasan melalui udara (Kuok, 2016).

Kedua negara juga membahas penyebaran kapal tempur internasional (LCS) AS yang sedang berlangsung ke Singapura. LCS kedua, USS Fort Worth, dikerahkan ke Singapura pada Desember 2014, dan penyebaran ketiga dilakukan pada 2016. Amerika Serikat sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menyebarkan hingga empat LCS secara bersamaan di wilayah tersebut pada 2017.

Gambar 2.2: Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang



Sumber: Global Security <https://www.globalsecurity.org/military/facility/kadena.htm>

SSementara itu, Pangkalan Udara Kadena adalah pangkalan Angkatan Udara AS di kota Kadena, Prefektur Okinawa, Jepang. Pangkalan Udara Kadena merupakan markas dari berbagai amunisi perang terkemuka AS, antara lain: Wing ke-18 USAF, Grup Operasi

Khusus 353, Unit Pengintai, Batalyon 1, Artileri Pertahanan Udara 1, dan berbagai unit terkait.

Lebih dari 20.000 tentara AS, anggota keluarga, dan karyawan Jepang tinggal atau bekerja di Pangkalan Udara Kadena (Kadena Military, 2003). Ini adalah pangkalan Angkatan Udara AS yang terbesar dan paling aktif di Timur Jauh (Global Security, 2012)

Pangkalan Udara yang telah aktif semenjak 1950-an ini kemudian ditutup sementara, dan pasukannya direlokasi menuju kawasan Guam. Penyebabnya adalah terjadinya penolakan kehadiran pasukan AS. Pasukan AS di kawasan Okinawa sudah cukup lama memunculkan kontroversi dalam negeri. Warga lokal di Okinawa mengatakan keberadaan Pangkalan Kadena serta Futenma di Okinawa sangat mengganggu karena dianggap berbahaya dan sangat bising. Selain itu, di kawasan ini kerap terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh personil militer AS, termasuk kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tiga anggota militer AS terhadap seorang gadis berusia 12 tahun (Tempo, 2012).

Namun, 27 April 2012 terjadi pertemuan *Security Consultative Committee* (SCC), dihadiri oleh Leon Panetta (Menteri Pertahanan AS), Hillary Clinton (Menteri Luar Negeri AS), Naoki Tanaka (Menteri Pertahanan Jepang), serta Koichiro Genba (Menteri Luar Negeri Jepang). Pertemuan ini menghasilkan *Joint Statement SCC*, yang intinya adalah melakukan komposisi ulang unit militer AS di Okinawa, dan kembali

mengaktifkan Pangkalan Futenma dan Kadena Selatan (MOFA, 2012). Selain melakukan penempatan ulang militer di kawasan Futenma dan Kadena Selatan, penempatan juga dilakukan di wilayah Pelabuhan Naha, Markas Kuwae, Markas Zukeran dan Daerah Makiminato.

Setelah dilaksanakannya *Joint Statement SCC* oleh kedua belah pihak, terjadi peningkatan sangat signifikan terhadap jumlah unit fasilitas militer di Okinawa, khususnya di Pangkalan Kadena. Terutama ada beberapa unit militer besar yang bertambah cukup signifikan, seperti *Main Battle Tank* yang bertambah dari sebelum kesepakatan hanya tersedia 10 unit menjadi 53 unit. Kemudian unit udara untuk garis tempur depan seperti *LR Super King Aircraft* yang sebelumnya belum ada di kawasan ini bertambah menjadi 7 unit. Unit senjata juga bertambah cukup signifikan, misalkan pada unit *RT 120mm Heavy Mortar* dari 50 unit, menjadi 430 unit. Untuk rincian lebih lengkap, lihat tabel 1.3.

Tabel 2.3 : Tabel peningkatan unit militer AS di Kadena Selatan

<b>Nama Alat</b>	<b>Sebelum Kesepakatan</b>	<b>Setelah Kesepakatan</b>
Type 10 Main Battle Tank	10	53
Type 89 Infantry Fighting Vehicle	9	68
Maneuvr Combat Vehicle	4	103
Type 73 Armored Personnel Carrier	24	338
FH-70 Towed Howitzer	200	310
Chemical Reconnaussance Vehicle	5	47
Type 92 Mine Clearance Vehicle	-	5
Bushmaster Protected Mobity Vehicle	-	4
LR-2 Super Kng Aircraft	-	7
Lr-1 MU-2 Aircraft	-	2
Bell Ah-1 Cobra	10	88
OH-6D Scout Helicopter	50	106
RT 120mm Heavy Mortar	50	430
L16 81mm Mortar	-	5
Type 91 Portable Air Missile	100	210

Sumber: Joint Statement of the Security Consultative Committee by Clinton, Panetta, Gamba and Tanaka [https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scj/pdfs/joint\\_120427\\_en.pdf](https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scj/pdfs/joint_120427_en.pdf)

### **3. Pangkalan Kooperatif Keamanan Darwin (Australia) dan Filipina**

Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden Barack Obama pada 15 November 2011, diumumkan keinginan AS meningkatkan

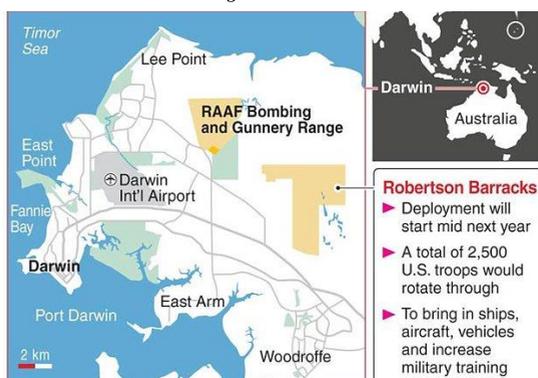
keberadaan militernya di wilayah Asia-Pasifik. Bersama dengan PM Australia, Julia Gillard, Obama telah mengumumkan penempatan 2.500 personil militer AS di pangkalan militer Australia di Darwin (Tempo, 2011). Pangkalan militer Amerika di Darwin ini sebenarnya telah mulai dibangun pada tahun 1938 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juni 1940, namun pangkalan ini dinonaktifkan setelah Perang Dunia II berakhir.

Pasukan militer di Darwin ini diharapkan akan bertindak cepat atas masalah-masalah kemanusiaan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, AS dapat meningkatkan kesiagaan untuk menggelar operasi tanggap darurat bencana alam di kawasan ini. Pasukan dikirimkan secara bertahap, dengan sebanyak 200-250 marinir AS mulai ditempatkan pada pertengahan 2012. Mereka akan menjalankan tugas selama 6 bulan dengan sistem rotasi.

Pasukan marinir AS ini akan bergerak lebih sering dari dan keluar Northern Territory. Dalam waktu enam tahun direncanakan jumlahnya akan meningkat menjadi 2.500 personil. Walaupun dengan sistem rotasi, dilaporkan gelar pasukan marinir AS di Darwin tersebut dilakukan secara permanen. Kehadiran secara permanen ini sebenarnya telah dipertimbangkan beberapa tahun sebelumnya ketika Washington mulai memperkuat komando Pasifiknya.

Gelar pasukan AS di Australia ini melengkapi pangkalan mata-mata Joint Defence Facility di Pine Gap dekat Alice Springs. Selain barak Robertson di Darwin yang sudah ada, lokasi-lokasi lain seperti di Perth di barat Australia mungkin juga akan digunakan oleh pasukan AS. Kehadiran militer AS di Australia akan menambah jumlah pasukan marinir negeri itu yang sudah ada sejak lama di Okinawa, Jepang, dan di Guam, sebagai pasukan tempur utama AS di kawasan Pasifik.

Gambar 2.4: Pangkalan Militer AS di Darwin



Sumber: Viva News <https://www.viva.co.id/berita/dunia/264758-as-tambah-pasukan-di-australia-bagian-utara>

Walaupun dalam kesepakatan dengan Australia tidak disebutkan bahwa AS akan mendirikan pangkalan militer permanen, namun diungkapkan akan banyak pasukan AS singgah di sana. Juga, AS tidak boleh membawa senjata nuklir ke dalam wilayah Australia, walaupun kapal (selam atau induk) dengan tenaga nuklir boleh masuk (Viva, 2011).

Bahkan, untuk melawan ancaman yang terus diberika oleh China, Juli 2017, AS terus mengirimkan personil militer di Darwin, Australia. Penempatan 2.500 personil militer di Darwin ini semakin menegaskan keinginan AS untuk terus mengembangkan kekuatan militernya di kawasan ini.

Penambahan personil militer ini semakin menambah jumlah personil militer AS di Australia yang telah dikirimkan sejak 2011 silam dengan jumal 2.500 personil. Tercatat, ada hampir 4.000 militer AS dengan berbagai senjata dan pesawat tempur AS di kawasan Darwin, Australia. (Berlianto, 2018).

Di Darwin, setiap musim kering dua tahunan, militer kedua negara melakukan pelatihan bersama di area Lapangan Pelatihan Bradshaw. Terdapat beberapa gugus dan pasukan yang ada, yakni Pasukan Perintah, Pasukan Tempur Darat, Logistik, dan Pasukan Tempur Udara, yang terdiri dari beberapa Tim Udara, yakni Black Hawk, Kobra, Hueys dan Harrier Jump Jets.

Selain itu, dalam rencana awal Amerika Serikat, selain adanya peningkatan dan pelatihan pesawat tempur AS di pangkalan udara Tindal dan AS B-52 Bombers, AS akan terus melakukan peningkatan kapasitas dan kuantitas dari pesawat lain di Darwin, mulai dari pesawat tempur, pesawat pengisi bahan bakar, pesawat mata-mata dan pesawat transportasi. Selain itu, nantinya di Pangkalan Darwin ini akan didistribusikan beberapa kapal selam AS, yang ada di Pangkalan Angkatan Laut Stirling di Perth Selatan (Coorey, 2011).

Sementara itu, AS juga semakin menunjukkan kekuatannya, dengan melakukan penandatanganan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) dengan Filipina, 28 April 2014. Inti dari kerjasama ini adalah AS diizinkan untuk mengirimkan militer ke Filipina untuk masa tinggal yang lama, serta AS dimungkinkan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas pangkalan militer di Filipina (Dizon, 2015).

EDCA ditandatangani oleh Sekretaris Pertahanan Filipina, Voltaire Gazmin dan Duta Besar AS untuk Filipina, Philip Goldberg, di Manila (Guinto, Talev, & Mattingly, 2014). Bahkan, ketika banyak masyarakat Filipina yang melakukan protes akan kebijakan ini, Pemerintah Filipina berhasil memenangkan gugatan di tingkat Mahkamah Agung, dan kebijakan ini ditetapkan secara resmi bersifat konstitusional dan mengikat, semenjak 26 Juli 2016 (Meruenas, 2016).

Menurut Duta Besar Goldberg, tujuan utama EDCA adalah untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan ini. Perjanjian ini juga memungkinkan Amerika Serikat untuk merespons lebih cepat terhadap bencana lingkungan dan kemanusiaan di wilayah tersebut (Ankit, 2014).

Perjanjian ini menyatakan bahwa Filipina menyerahkan semua kontrol operasional "Lokasi yang Disetujui" ke Amerika Serikat, dan membebaskan militer AS untuk melakukan preposisi dan menyimpan bahan, peralatan, dan segala macam persediaan pertahanan, kecuali senjata nuklir.

EDCA berlaku untuk periode awal sepuluh tahun, dan setelah itu, akan berlaku secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu tahun sebelumnya, melalui saluran diplomatik. Ketika kerjasama antar kedua negara berakhir, AS diwajibkan menyerahkan setiap dan semua fasilitas di "lokasi yang disepakati" kepada pemerintah Filipina.

April 2015, Pemerintah AS meminta akses ke delapan pangkalan di Filipina, salah satunya adalah salah satu pangkalan besar di Filipina, yakni *Subic Bay* dan Pangkalan Udara Clark, serta pangkalan Cebu, Luzon, dan Palawan (The Sydney Morning Herald, 2015). Namun, pada 19 Maret 2016, pemerintah Filipina dan AS hanya menyepakati 5 lokasi pangkalan militer untuk pasukan AS di bawah EDCA, yakni: Pangkalan Udara Antonio Bautista (Palawan), Pangkalan Udara Basa (Pampanga), Benteng Magsaysay (Nueva Ecija), Bandara Lumbia (Cagayan de Oro) dan Pangkalan Udara Benito Ebuena (Mactan, Cebu) (Katigbak, 2016).

### **C. Respon Berbagai Pihak atas Kebijakan Keamanan AS di Asia Pasifik**

Pembangunan pangkalan militer AS di beberapa wilayah di Asia Pasifik merupakan misi penting bagi AS karena fokus utama AS adalah kawasan ini, terutama dalam menyongsong tantangan di abad ke 21. Tetapi, harapan dari AS tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan karena pembangunan pangkalan militer AS ini ternyata menimbulkan banyak reaksi dari negara-negara lain.

Malaysia menentang pembangunan pangkalan militer AS, terutama di wilayah Darwin, Australia. Bagi Malaysia, ini merupakan langkah pergerakan militer yang dapat merusak keamanan di kawasan Asia Pasifik, dan mereka percaya bahwa ini akan mengganggu stabilitas regional di kawasan Asia Pasifik (Mahadzir, 2014).

Selain Malaysia, dua negara Asia Tenggara lain yakni Kamboja dan Vietnam juga tidak sepakat terhadap kebijakan AS dalam melakukan pembangunan pangkalan militer serta pengiriman militer di kawasan Asia Pasifik. Bagi kedua negara, pembangunan yang dilakukan oleh AS justru akan mengganggu stabilitas dan netralitas yang telah lama dibangun di kawasan ASEAN secara khusus. Bah Mkan, kedua negara secara tegas menolak apabila negaranya ditawarkan untuk dibangun pangkalan militer, dengan alasan yang telah disebutkan. PM Kamboja, Hun Sen, mengatakan sangat mengecam pembangunan pangkalan militer di kawasan Asia Pasifik, dan bahkan secara tegas menolak keberadaan pangkalan militer asing, terutama dinegaranya. Padahal selain AS, sejak 2017, China telah melakukan lobi pembangunan pangkalan militer angkatan laut di wilayah Koh Kong (Marniati, 2018).

Serupa dengan kedua negara, pembangunan pangkalan militer AS di kawasan Asia Pasifik, terutama di wilayah Darwin yang hanya berjarak 820 kilometer dari Indonesia, menimbulkan banyak keresahan dan penentangan dari Indonesia. Bahkan menurut beberapa pihak, adanya pangkalan militer AS di Darwin memiliki tujuan utama untuk memerdekakan Papua dari Indonesia (Nahi Munkar, 2014). Keresahan juga hadir akibat ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS) melalui UU No. 17/1985 tentang pengesahan UNCLOS, dianggap masih tidak cukup mengikat dan

membantu. Apalagi, AS bahkan juga merupakan pihak yang tidak meratifikasi hukum ini. Dengan memiliki pesawat-pesawat pengintai dengan teknologi kelas tinggi yang diparkir di beberapa pangkalan seperti di Darwin dan Singapura, tentu pesawat-pesawat ini akan sulit untuk dilacak oleh Indonesia, terutama ketika memasuki wilayah abu-abu seperti di kepulauan Natuna (BBC Indonesia, 2012).

Secara formal atas nama negara, Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya saat itu, Marty Natalegawa, mengakui Indonesia tidak keberatan dengan rencana Indonesia untuk melakukan pembangunan dan pengiriman pasukan militer di Singapura dan Darwin. Bahkan menurutnya, ini justru menjadi sebuah kesempatan berharga untuk mengembangkan respon dalam penanganan bencana alam dan bantuan kemanusiaan di wilayah Asia Pasifik. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengingatkan berbagai pihak bahwa penempatan pasukan dalam jumlah besar, terutama di wilayah berbatasan dengan Indonesia, untuk melakukan komunikasi intensif untuk menghindari berbagai kesalahpahaman serta ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan (BBC Indonesia, 2016).

Langkah AS melalui fokusnya ke kawasan Asia Pasifik ini juga menimbulkan reaksi keras dari China. Bahkan untuk merespon pembangunan pangkalan militer di Darwin dan diaktifkan kembalinya pangkalan militer di Yokosuka, China langsung melakukan latihan militer di kawasan Pasifik Barat. Bahkan, China langsung mengirimkan kapal-kapal patrol ke wilayah Sungai Mekong demi menjaga kepentingan perdagangannya di wilayah itu. Langkah lebih cepat bahkan telah dilakukan oleh China, dengan melakukan modernisasi militernya dengan membangun kapal induk baru dan pengembangan kemampuan

antiakses/penyangkalan wilayah melalui rudal-rudal jarak jauh Dong Feng 21-D (Aulia, 2012).

China tentu sangat geram akan isu ini. Kementerian Luar Negeri China segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kehadiran pasukan AS di Asia Pasifik, terutama di Darwin dianggap berada di waktu yang tidak pas Bahkan sebuah Koran milik Partai Komunis China secara langsung memperingatkan Australia dan Singapura untuk tidak menganggap China sebagai negara orang-orang bodoh, karena melakukan gertakan kepada China dengan bekerjasama bersama AS dalam pembangunan pangkalan militer (Bama, 2011).